

Budaya: Estetika Kekuasaan?

Oleh Ariel Heryanto

SALAH satu fungsi kebudayaan yang menonjol di sepanjang sejarahnya ialah mengabdikan pada kekuasaan dan memalsukan realitas penindasan yang terjadi di dalam masyarakat. Fungsi kebudayaan itu tidak terlalu berbeda dari fungsi ekonomi, teknologi, birokrasi, hukum, pendidikan, media massa atau militer.

Memalsukan Realitas

Fungsi dominan itu memang bukanlah satu-satunya kemungkinan fungsi kebudayaan (atau ilmu, teknologi, ekonomi, dsb.). Fungsi kebudayaan bisa beraneka-ragam, potensinya sangat kaya. Tetapi aneka potensi kebudayaan itu hampir selalu tertindas oleh kekuasaan politik. Dalam situasi demikian, kebudayaan diseragamkan, diresmikan, dan dipropagandakan sebagai sesuatu yang tunggal, utuh, tertib, aliamiah, abstrak, serta suci dan rapi.

Kebudayaan yang mengabdikan pada kekuasaan tidak saja memalsukan gambaran realitas sosial yang nyata dialami sehari-hari oleh masyarakat. Kebudayaan itu juga menyangkal pengabdianannya terhadap kekuasaan. Ia menyangkal penindasan terhadap potensi keanekaragaman yang dimilikinya sendiri.

Dalam situasi demikian, praktek kebudayaan sibuk menciptakan estetika realitas politik supaya realitas dapat dilestarikan secara "tertib dan aman". Mereka yang diuntungkan oleh penindasan akan belajar tidak merasa sedang menindas, apalagi melakukan kejahatan. Mereka yang dirugikan akan belajar kebal terhadap penderitaan hidup yang dirusak pihak lain; akan belajar pasrah dan menikmati penderitaan itu sebagai sesuatu yang mulia; akan menyalahkan diri sendiri atau bingung dan apatis.

Kebudayaan dapat dibicarakan secara kritis apabila dipahami secara konkret dalam batasan sejarah sosial tertentu, yang senantiasa berbeda-beda. Tidak dalam abstraksi umum di luar realitas sejarah. Kebudayaan perlu dikaji dalam berbagai aspeknya, majemuk dan dinamis. Bukan sebagai suatu esensi atau hakikat yang beku, statis atau aliamiah.

Hantu Modernisasi

Uraian di atas kedengarannya sangat sederhana dan lumrah. Tapi uraian itu penting diingatkan kembali di saat kita dilanda pembahasan yang memperlakukan kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat otonom, utuh, tunggal (bukan majemuk dan penuh keterbukaan), esensial (bukan bentukan sosial), abstrak (tidak sebagai pengalaman konkret kita), dan universal (bukan sementara dan terikat pada konteks lingkungan).

Baru-baru ini, *Suara Merdeka*

(27/03/93) menerbitkan dua artikel opini yang menggelitik. Keduanya ditulis oleh ilmuwan sosial yang selama ini saya kagumi sebagai cendekiawan berwawasan kritis dan cemerlang. Bambang Suteng Sulasmono menulis tentang "Kendala Pengawasan DPR". Sedangkan Cornelis Lay membahas kendala "Rasionalisasi Kekuasaan". Keduanya mengkaji hubungan kebudayaan dan kekuasaan politik di Indonesia saat ini. Tapi berbeda dari berbagai tulisan mereka pada kesempatan lain, di sini keduanya tergoda oleh konsep "kebudayaan" yang selayaknya mereka gugat.

Dengan kombinasi keluwesan sikap kritis dan simpatik, Bambang mempertanyakan kemampuan DPR dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga eksekutif. Impotensi DPR selama sepelempat abad ini menjadi rahasia umum, karena itu tak perlu dipersoalkan lagi di sini. Yang mengagetkan ialah kemurah-hatian Bambang menjelaskan impotensi lembaga ini dengan menyalahkan prosedur administrasi, peraturan dan "kebudayaan kita".

Ada dua kendala bagi DPR menurut Bambang. Yaitu "aturan tentang mekanisme penggunaan hak mau pun budaya politik yang ada, membatasi peluang penggunaan hak-hak itu." Misalnya, hak angket DPR. Tidak ada acuan legal yang memadai. Yang ada malahan hambatan yang disebutnya "mendasar", yakni "budaya politik kita". Yang dimaksudkan Bambang dengan "budaya politik kita" adalah berbicara jujur, terbuka, dan kritis. Singkatnya, politik demokratis yang diamanatkan dalam rumusan Pancasila.

Oleh Bambang, demokratisasi dibicarakan seakan-akan sebagai budaya yang belum menjadi milik kita. Maka disebutnya sebagai "Budaya Baru" dalam subjudul di penghujung tulisannya. Oposisi dalam politik masih digambarkan Bambang dengan cara seperti propaganda resmi. Yakni sebagai hal "yang lazim dimainkan partai oposisi di negara Barat".

Apa yang disebut Bambang dengan antusias sebagai "budaya baru" atau "Barat" disebut sebagai "rasionalisasi kekuasaan" dalam bahasan Cornelis Lay. Yang dimaksudkan Cornelis ialah kehidupan bernegara yang dilandasi aturan resmi yang rasional, sekuler, tidak mistik atau supernatural, juga tidak lagi subjektif-personal. Cornelis menilai politik Indonesia sudah kian rasional, tapi masih dibebani klenik-klenik irasional.

Bambang maupun Cornelis jelas bersikap kritis terhadap status quo, rasional, dan bersemangat demokratis. Tapi sulit dibantah, kedua-

nya masih tergoda oleh ideologi "modernisasi". Yakni ideologi Pembangunan yang dominan hampir di semua benua setelah Perang Dunia II. Menurut paham ini, masyarakat pribumi bekas terjajah menjadi terbelakang karena "hambatan kultural" (istilah yang juga dipakai Bambang tanpa ironi). Celakanya lagi, hambatan kultural ini dianggap teori modernisasi sebagai bagian aliamiah dari "kepribadian Timur". Kontras dengan "Barat" yang dianggap modern, rasional, sekuler, dan demokratis.

Lebih dari satu dekade belakangan ini, para tokoh utama teori-teori modernisasi di Barat sudah bertobat. Mereka mengakui bukan saja kekeliruan pokok-pokok teori mereka, tetapi juga penghinaan yang tidak etis, tidak rasional, tidak kritis, dan tidak modern di balik teori-teori klasik itu.

Celakanya, di Timur sendiri (korban utama teori mau pun praktek Pembangunan ala "modernisasi"), paham itu masih berkembang biak dan gentayangan di mana-mana. Bambang dan Cornelis bukanlah penganjur modernisasi. Tetapi justru karena itulah tulisan mereka layak dikomentari. Orang yang kritis terhadap modernisasi masih bisa tergoda ideologi modernisasi.

Estetika Politik

Setidak-tidaknya ada dua hal yang perlu dikemukakan untuk menanggapi kajian politik budaya Bambang dan Cornelis. Pertama, gejala-gejala "budaya" yang mereka amati dan bahas memang merupakan kenyataan empirik yang dominan di sekitar kita. Tetapi ini tidak berarti gejala-gejala itu merupakan sumber penyebab atau penjelas realitas politik kita.

Di mana dan kapan pun, pada tingkat yang paling mendasar, tata-politik ditentukan terutama (bukan hanya) oleh kekuatan kekerasan. Bukan dinamika nilai budaya. Sosok budaya yang gampang kelihatan kasat-mata merupakan gejala yang juga gampang menipu. Ia merupakan hasil bentukan tata-politik yang mengabdikan pada kekuasaan yang berjaya, atau menjadi reaksi kritis terhadapnya.

Praktek budaya sering memalsukan realitas, karena ia tidak punya pilihan lain. Pada tampang luarnya, kebudayaan bisa tampil penuh senyum dan *manthuk-manthuk*. Bisa juga bertampang kritis, rasional, dan modern. Tetapi perbedaan ini tidak fundamental dan tidak mendasar. Ini hanya perbedaan "gaya" dalam estetika politik yang berdasarkan kekerasan. Inilah fungsi dominan kebudayaan.

Dengan demikian, kita sampai pada soal kedua yang perlu diajukan. Perbedaan Timur dan Barat merupakan dikotomi yang sudah terlalu lama menyesatkan dan merugikan terlalu banyak pihak. Perbedaan itu menyesatkan bukan saja karena sekadar beda tampang atau gaya budaya. Sebagai gaya atau tampang pun, dikotomi Barat-Timur lebih banyak berupa tahayul.

Di Barat, ada banyak gaya irasional, mistik, dan senyum-senyum. Ingat, Presiden Reagan selalu berkonsultasi dengan dukun. Rasialisme dan fundamentalisme agama menyeruak di pusat-pusat adikuasa Barat. Demokrasi di Barat, yang masih banyak cacatnya, merupakan hasil perjuangan susah-payah berabad-abad sejumlah tokoh, yang juga ada di Timur. Di Timur, aspirasi demokratis dan rasional Barat memiliki penggemar. Jumlahnya memang sulit dipastikan. Tetapi tampaknya, lebih banyak daripada yang diduga Bambang maupun Cornelis. Apalagi yang diakui oleh propaganda resmi.

Tetapi kekuasaan, di Timur maupun Barat, selama ini menyangkal dan menyembunyikan berbagai kemajemukan dan kemiripan baik di Timur maupun di Barat. Barat-Timur dipertentangkan secara hitam-

putih. Apalagi di antara elite Timur. Dikotomi salah-kaprah itu sudah terlanjur populer seperti nasib dikotomi pribumi-nonpribumi, ekstrem kiri-kanan, dan kodrat pria-wanita.

Persis seperti dikotomi yang lain, dikotomi Barat-Timur terbentuk lewat sejarah panjang yang pada dasarnya bersumber pokok pada kekerasan, siksaan, teror, dan pembantaian. Kolonialisme, misalnya. Kolonialismelah yang menjadi *the founding fathers* Barat maupun Timur (termasuk tanah-air, bangsa dan bahasa kita).

Haatzaai Artikelen

Nasionalisme memang antitesa kolonialisme. Tetapi nasionalisme dibentuk, dikandung, dilahirkan, dan didewasakan juga oleh kolonialisme. Hubungan nasionalisme dan kolonialisme dialektis dan majemuk dalam konteks kesejarahan yang konkret.

Salah besar jika kolonialisme kita bayangkan sebagai sejarah masa lampau yang tuntas. Dalam berbagai bentuknya, kolonialisme merupakan bagian dari realita kita sehari-hari, di berbagai sektor hidup masa kini. Untuk memahami hal ini, sebut saja satu contoh, yakni pasal pidana *haatzaai artikelen*.

Haatzaai artikelen adalah pasal pidana untuk menghukum siapa saja yang dianggap menyatakan penghinaan, permusuhan atau kebencian pada penguasa negara. Pidana ini diberlakukan pemerintah Hindia Belanda untuk menghukum bangsa terjajah, yang tidak berterima kasih atau menyatakan kasih-sayang kepada penguasa yang telah mengobrak-abrik dan menindas hidup mereka.

Jelas, di negeri Belanda, hukum pidana seperti itu tidak bisa diberlakukan oleh pemerintah. Rakyatnya pasti berontak. Berbeda dari di tanah jajahan: rakyat hanyalah kuli untuk diperas dan disiksa. Atau direkrut jadi intel dan mandor untuk mengawasi sesama bangsa. Banyak pejuang nasionalis dan wartawan yang menjadi korban pidana politik kolonial itu. Kita bersyukur Indonesia merdeka, antara lain berkat jasa para pejuang yang dulu berani melanggar *haatzaai artikelen*.

Hampir setengah abad penjajahan Belanda sudah runtuh. Hari ini *haatzaai artikelen* masih utuh dan segar-bugar. Bahkan keluhap-mekam korban-korbannya bukan lagi para wartawan-pejuang (yang kini kian langka), melainkan aktivis mahasiswa yang belajar ilmu tidak hanya untuk mendapatkan ijazah dan gelar, pekerjaan terhormat dan gaji tinggi. Selama ini, banyak sudah rakyat Indonesia yang menuntut dihapuskannya pasal-pasal pidana itu. Tetapi nasib tuntutan ini belum lebih baik dibanding dengan zaman kolonial.

Haatzaai artikelen, kini sudah dianggap sebagai bagian dari kepribadian Timur yang asli. Kepribadian ini tidak mengakui adanya oposisi atau kritik terhadap pemerintah. Kepribadian ini dipropagandakan berbeda bahkan bertentangan dengan "Barat" yang dianggap dari sononya sudah ditakdirkan "demokratis". (28)

—Ariel Heryanto, staf pengajar Program Pascasarjana UKSW Salatiga.